

ANALISIS KINERJA BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MINAHASA

Firman Nia Fransiska Bawias, Rocyke I. Pangkey

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado, Tondano

e-mail: firmania2001@gmail.com

Abstrak: Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya Kembali oleh pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini analisis deskriptif kualitatif. berdasarkan laporan realisasi belanja dari tahun 2016-2020. Teknik analisis data menggunakan analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja dan analisis efisiensi belanja. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kinerja belanja pada pemerintah daerah Kabupaten Minahasa dalam menggunakan analisis varians belanja dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penghematan anggaran belanja masih kurang efisien, terbukti dengan rata-rata rasio efisiensi mencapai sebesar 91,88%. Efisiensi, Pertumbuhan belanja terlihat pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 BPKAD Kabupaten Minahasa belum dapat melakukan pemanfaat Belanja dalam APBD secara efisien, Sehingga diharapkan pada tahun selanjutnya pemerintah kabupaten minahasa sebaiknya mengalokasikan belanja daerah dalam porsi yang seimbang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat serta Pimpinan BPKAD sebaiknya meninjau lebih jauh manfaat serta pengalokasian belanja daerah sehingga dapat meningkatkan efektivitas, produktivitas dan efisiensi belanja di masa yang akan datang.

Kata kunci: analisis kinerja, belanja, laporan realisasi anggaran

Abstract: Expenditures are all expenditures from the reduced regional general treasury accounts Current equity funds in the relevant fiscal year period which will not be repaid by the regional government. The purpose of this study was to find out and analyze the Expenditure Performance in the Budget Realization Report (LRA) at the Minahasa Regency Regional Financial and Asset Management Agency. The method used in this study is a qualitative descriptive analysis based on expenditure realization reports from 2016-2020. Data analysis techniques use analysis of variance spending, analysis of spending growth, analysis of shopping compatibility, and analysis, shopping efficiency. The results of the study concluded that the performance of spending on the regional government of Minahasa Regency using analysis of variance in spending from 2016 to 2020 can be concluded that in making budget savings it is still inefficient as evidenced by the average efficiency ratio reaching 91.88%. Expenditure growth can be seen from 2016 to 2020 BPKAD Minahasa Regency has not been able to efficiently utilize Expenditure in the APBD. So that it is hoped that in the following year the Minahasa district government should allocate regional spending in a balanced portion according to regional development needs and community welfare and the BPKAD leadership should further review the benefits and allocation of regional spending so as to increase the effectiveness, productivity and efficiency of spending in the future.

Keywords: performance analysis, spending, budget realization report

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi di Indonesia sejak disahkannya Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, membawa konsekuensi bagi pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Menurut (Wongkar et al., 2021) Otonomi daerah merupakan kekuasaan, wewenang, dan kewajiban daerah otonom dalam mengelolah dan mengatur daerah masing-masing yang berhubungan dengan pekerjaan pemerintahan dan keinginan rakyat suatu wilayah tersebut berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah merupakan sebuah entitas yang terorganisir memiliki kebijakan independen untuk mengelola dan mengatur sistem pemerintahan di suatu negara. Lembaga pemerintah biasanya didirikan dengan tujuan utama untuk menyediakan layanan kepada masyarakat umum. Mereka adalah organisasi non-profit yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang mereka berikan di masa depan, bukan untuk mencari keuntungan finansial. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan dan Undang-undang No.1 tentang perbendaharaan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Catata Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan harus dihasilkan melalui suatu system dana prosedur yang lazim. Di dalam Pasal 6, PP 8/2006 Dinyatakan bahwa laporan Keuangan pemerintah dihasilkan dari suatu system akuntansi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Terdapat dua komponen laporan keuangan yang dihasilkan secara langsung dari sistem (proses) akuntansi yaitu neraca dan leporan operasional (LO) atau laporan realisasi anggaran (LRA). LAK (laporan arus kas), LPE, LP SAL, dihasilkan melalui analisis dari neraca, LO dan LRA sedangkan CaLK tidak dapat dihasilkan secara langsung (otomatis) dari system (proses) akuntansi, karena informasi di dalam CaLK bersifat kuantitatif/deskriptif. Bahkan informasi dalam CaLK juga mencakup non-akuntansi dan bisa dilengkapi dengan berbagai macam table maupun grafik yang dinggap relevan. Suatu system akuntansi pemerintah setidaknya-tidaknya mengatur mengenai format laporan keuangan, kebijakan akuntansi, prosedur akuntansi, bagan akun standar, jurnal standar, entitas pelaporan dan entitas akuntansi, dokumen transaksi yang digunakan. Penyusunan system akuntansi pemerintah daerah (SAPD) tersebut harus mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan ketentuan perundang-undangan yang terikat dengan pengelolaan keuangan daerah (Liando & Elim, 2016).

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kecamatan, kota atau provinsi) yang memerlukan (Halim, 2013). Sistem Akuntansi keuangan daerah menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yaitu system akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. (Mokoginta et al., 2017) menjelaskan bahwa akuntansi keuangan

daerah dapat di definisikan sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi satu tahun dan menyatakan pendapat dan beban yang direncanakan untuk tahun itu. Dengan anggaran manajemen dapat menentukan efektifitas dan efisiensi suatu operasi dengan membandingkan antara anggaran dengan hasil aktual (realiasi terkini) yang dicapai (Sartika, 2018). Untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat langsung dinyatakan dalam bentuk baik atau tidaknya, karena penilaian kinerja yang ada pada pemerintah tidaklah sama dengan penilaian kinerja pada perusahaan atau bentuk lainnya dari perusahaan-perusahaan yang memperoleh laba dalam pelaksanaan teknisnya (Sartika, 2018).

Menurut Mahmudi yang dikutip dalam penelitian (Katit & Pitanik, 2016) Belanja dalam laporan realisasi anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik (*public fund*) melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah tersebut juga mencerminkan kebijakan menghasilkan pendapatan merupakan suatu hal yang lebih sulit dibandingkan membelanjakan karena sifat belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap belanja sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran, analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan ke depan.

Menurut (Ratmono, 2017) Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan laporan mengenai perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasi dalam satu tahun anggaran. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk nilai kinerja keuangan daerah dibandingkan dengan neraca, LRA menduduki prioritas yang lebih penting, dan LRA ini merupakan jenis laporan keuangan daerah yang paling dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan neraca dan laporan arus kas. Anggaran dalam pemerintah merupakan tulang punggung (*backbone*) penyelenggaraan pemerintah. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, alokasi sumber daya public, perencanaan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Pengelolaan keuangan daerah merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah transparansi, akuntabilitas, dan kinerja biaya. Transparansi dalam bentuk proses perencanaan, pembuatan dan pelaksanaan anggaran daerah. Anggota masyarakat mempunyai persamaan dan akses untuk mengetahui proses anggaran, karena menyangkut keinginan dan kepentingan bersama untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat (Manumpil & Sumual, 2022) .

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program/kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan lebih penting

adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditergetkan pada saat perencanaan. Pengukuran kinerja dimulai dengan proses penerapan indicator kinerja yang memberikan informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan unit kerja sector public untuk memonitoring kinerjanya dalam menghasilkan output dan outcome terhadap masyarakat. Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu para pengambil keputusan dalam memonitor dan memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas public (Fajriyah, 2019). Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian, karena organisasi dapat menetapkan reward&punishment. Tujuan system pengukuran kinerja yaitu untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik, menyeimbangkan ukuran kinerja finansial & non-finansial, mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah, serta memotivasi pencapaian goal congruence alat mencapai kepuasan individu maupun kolektif yang rasional. Manfaat pengukuran kinerja ada pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, memonitor dan mengevaluasipercapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward & punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan system pengukuran kinerja yang telah disepakati, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi, membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah dan memastikan bahwa pengambilan dilakukan secara objektif (Paillingan et al., 2015).

Keterkaitan antara Anggaran dan Realisasi memberikan gambaran bagaimana sebuah instansi dapat dikatakan efisien atau tidak, dalam pengambilan keputusan penganggaran dan pembiayaan selama satu tahun anggaran tersebut. Dengan alat ukur berupa analisis yang didasarkan pada penggambaran yang mendukung Analisa kinerja anggaran belanja. Untuk mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nominal dan persentasenya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) belanja yang disajikan akan terlihat sejauh mana keefektifan dan penyerapan anggaran untuk aktivitas instansi selama satu tahun anggaran tersebut. Pengukuran kinerja anggaran ini dapat menggunakan Analisis Varians Belanja (Sartika, 2018). Untuk mengetahui seberapa besar anggaran dan realisasi terwujud dalam suatu instansi dapat dilihat melalui seberapa besar pemenuhan pada belanja kegiatan yang digunakan oleh instansi. Misalnya dengan melihat pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat menggunakan analisis Pertumbuhan Belanja. Pengukuran kinerja anggaran lainnya dapat dilihat dengan menggunakan Analisis Keserasian Belanja yang bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antara belanja. Salah satunya adalah dengan menilai Rasio Belanja operasi terhadap Total Belanja dan Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui keseimbangan antara belanja yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan dananya pada belanja secara optimal (Sartika, 2018).

Berdasarkan Tabel 1.1, permasalahan yang terjadi adalah berkaitan dengan penggunaan alokasi anggaran yang tidak terealisasi dengan optimal sesuai dengan penggunaan rencana alokasi anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Dapat dilihat bahwa belanja mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2016 terealisasi sebesar 88,25%. Pada

tahun 2017 kinerja belanja meningkat 6,29% dengan realisasi menjadi 94,54%. Pada tahun 2018 kinerja belanja naik 0,26% dengan realisasi menjadi 94,80%. Pada tahun 2019 kinerja belanja menurun 3,6% dengan realisasi 91,20%. Pada tahun 2020 kinerja belanja menurun 0,58% dengan realisasi menjadi 90,62%. Berdasarkan permasalahan di atas dapat diidentifikasi bahwa kinerja belanja masih belum stabil karena terjadinya fluktuasi atau ketidakstabilan target anggaran dan realisasi di tiap tahunnya. Realisasi tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dan penurunan hal ini terjadi karena adanya kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi belanja menjadi kurang tepat. Dapat dilihat dari realisasi anggaran tidak sesuai dengan target anggaran yang telah direncanakan.

Tabel 1.1
Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
per 31 Desember Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja		%
	Anggaran	Realisasi	
2016	1.499.009.508.155,00	1.322.939.271.392,00	88,25
2017	1.083.759.927.847,00	1.024.566.354.445,00	94,54
2018	1.342.992.215.624,00	1.273.130.917.962,00	94,80
2019	1.414.637.057.412,00	1.290.203.142.720,00	91,20
2020	1.109.597.443.310,00	1.005.558.155.697,00	90,62

Sumber: BPKAD Kabupaten Minahasa 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Minahasa merupakan Lembaga teknis daerah yang berfungsi sebagai unsur penunjang pemerintah daerah. Salah satu tugas yang dilakukan oleh BPKAD dalam melakukan kegiatan pemerintah salah satunya terkait tentang pengurusan Anggaran Belanja. Belanja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Minahasa dalam hal ini telah dan akan berupaya sebaik mungkin untuk menyesuaikan adanya perubahan-perubahan kondisi dan pengembangan dalam penyusunan anggaran belanja tetapi dengan tidak mengabaikan pengukuran kinerja anggaran baik secara mikro dan makro serta pengukuran kinerja anggaran standar biaya. Berdasarkan Sebagian besar uraian di atas tujuan penelitian ini yaitu mengetahui selisih antara anggaran belanja dan realisasi belanja, pertumbuhan realisasi belanja, efisiensi penggunaan anggaran belanja dan keseimbangan penggunaan anggaran.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis deskriptif karena bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan hasil analisis mengenai kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa. Metode analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana kinerja belanja tersebut tercermin dalam laporan realisasi anggaran. Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data guna memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang sedang diteliti, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang tepat.

Lokasi Penelitian

Tempat yang menjadi objek penelitian dari penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Minahasa. Jl. DR. Sam Ratulangi no. 333 Tondano, Sulawesi Utara.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian langsung di objek penelitian, dengan pengambilan data dari Laporan Realisasi Anggaran. Sementara itu, data sekunder berasal dari literatur-literatur yang relevan dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Data dari kedua sumber ini digunakan untuk mendukung analisis dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Varians Belanja

Analisis Varians Belanja Merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran yang ada pada tahun anggaran yang tersedia ditahun anggaran tersebut. Rumus pengukuran kinerjanya sebagai berikut:

$$\text{Analisis varians belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Tabel 4 1 Analisis Varians Belanja Tahun Anggaran 2016-2020

Thn	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Varians Belanja	Perbandingan
2016	1,499,009,508,155.00	1,322,939,271,392.00	- 176,070,236,763.00	88,25%
2017	1,083,759,927,847.00	1,024,566,354,445.00	-59,193,573,402.00	94,54%
2018	1,342,992,215,624.00	1,273,130,917,962.00	-69,861,297,662.00	94,80%
2019	1,414,637,057,412.00	1,290,203,142,720.00	- 124,433,914,692.00	91,20%
2020	1,109,597,443,310.00	1,005,558,155,697.00	- 104,039,287,613.00	90,62%

Sumber: Data Hasil Olahan

Berdasarkan analisis varians belanja, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran belanja dari tahun 2016 hingga tahun 2020 telah mengalami fluktuasi dalam tingkat efisiensinya. Pada Tahun 2016: Tingkat efisiensi sebesar 88,25% dengan penggunaan anggaran sekitar Rp 1,322,939,271,392.00 dari total anggaran. Penggunaan anggaran pada tahun ini cukup efisien. Tahun 2017: Tingkat efisiensi meningkat menjadi 94,54% dengan penggunaan anggaran sekitar Rp 1,024,566,354,445.00 dari total anggaran. Meskipun meningkat, tingkat efisiensi ini masih dianggap kurang baik dalam penghematan anggaran belanja. Tahun 2018: Tingkat efisiensi lebih tinggi lagi, mencapai 94,80% dengan penggunaan anggaran sekitar Rp 1,273,130,917,962.00 dari total anggaran. Namun, penggunaan anggaran tetap dianggap kurang efisien dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2019: Tingkat efisiensi menurun menjadi 91,20% dengan penggunaan anggaran sekitar Rp

1,290,203,142,720.00 dari total anggaran. Penggunaan anggaran masih belum sepenuhnya efisien. Tahun 2020: Tingkat efisiensi lebih lanjut menurun menjadi 90,20% dengan penggunaan anggaran sekitar Rp 1,290,203,142,720.00 dari total anggaran. Pemerintah masih dianggap kurang efisien dalam menggunakan penghematan anggaran belanja.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi dalam tingkat efisiensi selama periode tersebut, pemerintah masih dianggap belum sepenuhnya efisien dalam mengelola anggaran belanja. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengelolaan anggaran untuk meningkatkan efisiensi dan penghematan belanja pemerintah. Dapat dilihat untuk tahun 2017, 2018 dan 2019, BPKAD Kabupaten Minahasa belum efisien dalam pengelolaan anggaran belanjanya karena pada tahun 2017, 2018 dan 2019 ini terjadi keterlambatan dalam hal pelaksanaan anggaran. Kemudian pada tahun 2020, BPKAD Kabupaten Minahasa juga masih kurang efisien dalam pengelolaan anggaran belanjanya karena pada tahun tersebut, terjadi pandemic *covid-19* yang menyebabkan anggaran belanja difokuskan untuk menangani dampak dari pandemic tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 sampai pada 2020 kemampuan BPKAD Kabupaten Minahasa dalam melakukan penghematan anggaran belanja kurang efisien, terbukti dengan rata-rata rasio efisiensi mencapai sebesar 91,88%. Efisiensi ditentukan oleh ketepatan menggunakan anggaran pada program-program prioritas yang kesemuanya dimasukkan ke dalam anggaran belanja.

1. Analisis Pertumbuhan Belanja

Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kelangsungan dan Kesehatan fiskal daerah. Pertumbuhan belanja daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun } t = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t - \text{Realisasi Belanja Tahun } t-1}{\text{Realisasi Belanja Tahun } t-1} \times 100\%$$

Tabel 4 2 Analisis Pertumbuhan Belanja Tahun Anggaran 2016-2020

Uraian	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Realisasi belanja tahunan t-1	1,322,939,271,392.00	1,024,566,354,445.00	1,273,130,917,962.00	1,290,203,142,720.00
Realisasi belanja tahunan t	1,024,566,354,445.00	1,273,130,917,962.00	1,290,203,142,720.00	1,005,558,155,697.00
Kenaikan/penurunan	Negatif -298,372,916,947.00	Positif 248,564,563,517.00	Positif 17,072,224,758.00	Negatif 284,644,978,023.00
%	22,25%	24,26%	13,40%	22,06

Sumber: Data Hasil Olahan

Berdasarkan analisis pertumbuhan belanja, dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kabupaten Minahasa mengalami dinamika dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan belanja selama beberapa tahun terakhir. Pada Tahun 2016/2017: Terjadi penurunan sebesar Rp -298,372,916,947.00 atau sekitar 22,25%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut daerah masih belum mampu meningkatkan pertumbuhan belanja dan mengalami penurunan. Tahun 2017/2018: Terjadi kenaikan sebesar Rp 248,564,563,517.00 atau sekitar 24,26%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah berhasil meningkatkan pertumbuhan belanja dari periode sebelumnya. Tahun 2018/2019: Terjadi kenaikan sebesar Rp

17,072,224,758.00 atau sekitar 13,40%. Pada tahun ini, pemerintah berhasil mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan belanja dari periode sebelumnya. Tahun 2019/2020: Terjadi penurunan sebesar Rp -284,644,978,023.00. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun ini pemerintah belum mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan belanja dari periode sebelumnya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan dalam penelitian Rani Febri Ramadani pada tahun 2016 yang menggunakan analisis pertumbuhan belanja. Pertumbuhan belanja yang positif menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam manajemen anggaran untuk mencapai pertumbuhan belanja yang lebih stabil dan positif di masa mendatang.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kabupaten Minahasa belum dapat melakukan pengelolaan belanja dalam APBD secara efisien, karena terdapat variasi besar dalam pertumbuhan anggaran belanja dari tahun ke tahun, termasuk periode penurunan yang signifikan pada tahun 2017-2018 dan 2019-2020.

2. Analisis Keserasian Belanja

Untuk mengetahui keseimbangan antara belanja maka perlu menghitung keserasian belanja dengan menggunakan perhitungan rasio belanja operasi dan rasio belanja daerah, dapat menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.3 Rasio Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2016-2020

Thn	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Rasio Efisiensi (%)
2016	1,499,009,508,155.00	1,322,939,271,392.00	88,25%
2017	1,083,759,927,847.00	1,024,566,354,445.00	94,54%
2018	1,342,992,215,624.00	1,273,130,917,962.00	94,80%
2019	1,414,637,057,412.00	1,290,203,142,720.00	91,20%
2020	1,109,597,443,310.00	1,005,558,155,697.00	90,62%

Sumber: Data Hasil Olahan

Berdasarkan analisis rasio alokasi anggaran, kita dapat melihat bahwa selama periode 2016 hingga 2020, terjadi peningkatan signifikan dalam proporsi anggaran yang dialokasikan untuk belanja operasional. Pada tahun 2016, proporsi ini mencapai 60,78% atau setara dengan Rp 804.192.663.899,00, sementara pada tahun 2017, mencapai 80,53% atau Rp 825.124.666.357,00. Pada tahun 2018, proporsi tersebut menurun sedikit menjadi 66,09%

atau Rp 841.527.502.062,00, dan pada tahun 2019, mencapai 63,41% atau Rp 818.182.774.440,00. Kemudian, pada tahun 2020, proporsi belanja operasional mencapai 82,42% atau Rp 828.805.803.945,00. Pola ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran daerah lebih terfokus pada belanja operasional dan melebihi batas proporsi yang direkomendasikan, yaitu 60-90% dari total anggaran. Hal ini mencerminkan kinerja yang kurang optimal, karena alokasi anggaran untuk belanja operasional jauh lebih tinggi daripada alokasi anggaran untuk belanja modal, yang seharusnya juga mendapatkan perhatian penting.

Selanjutnya, alokasi anggaran untuk belanja modal selama periode 2016 hingga 2020 menunjukkan nilai yang sangat rendah, bahkan ada yang mendekati batas minimum yang direkomendasikan, yaitu 5-20% dari total anggaran yang dialokasikan. Akibatnya, anggaran BPKAD Kabupaten Minahasa dalam perencanaan dan realisasi belanja daerah lebih cenderung terfokus pada belanja operasional, sementara investasi dalam infrastruktur, irigasi, dan aset lainnya yang merupakan bagian dari belanja modal masih terlalu rendah. Ini menyoroti ketidakseimbangan dalam alokasi dana dan pentingnya untuk memprioritaskan alokasi anggaran untuk belanja modal guna mendukung pembangunan infrastruktur dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat memberi kesimpulan bahwa Analisis anggaran belanja dan realisasi belanja daerah untuk tahun 2016-2020 mengungkapkan fluktuasi dan ketidakstabilan dalam perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dana yang menjadi prioritas dari instansi mungkin tidak selalu tepat, dan beberapa program yang ada mungkin belum terlaksana dengan maksimal.
2. Pertumbuhan realisasi anggaran belanja pada BPKAD Kabupaten Minahasa selama periode 2016-2020 mengalami perubahan yang signifikan. Pertumbuhan belanja tahun anggaran 2016/2017 sebesar 22,25%, tahun 2017/2018 sebesar 24,26%, tahun 2018/2019 sebesar 13,40%, dan tahun 2019/2020 sebesar 22,06%. Hal ini menunjukkan adanya perubahan belanja yang cukup efisien selama periode tersebut.
3. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran belanja pada tahun 2016-2020, berdasarkan analisis varians belanja, menunjukkan bahwa penggunaan anggaran berada dalam batas target anggaran selama periode tersebut. Namun, jika dilihat dari rasio efisiensi belanja, penggunaan anggaran masih belum efisien karena belum memenuhi syarat efisiensi, yaitu penggunaan dana minimum untuk mencapai hasil maksimal.
4. Analisis keserasian belanja menunjukkan bahwa BPKAD Kabupaten Minahasa lebih memprioritaskan anggaran untuk belanja operasional daripada belanja modal. Hal ini mencerminkan bahwa fokus lebih ditekankan pada pengelolaan pemerintahan daripada pembangunan daerah. Seharusnya, pemerintah lebih menyeimbangkan jumlah belanja operasional dan belanja modal serta memberikan perhatian yang lebih besar pada pembangunan daerahnya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis di atas, maka penulis juga merekomendasikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk penelitian berikutnya, diharapkan agar peneliti dapat melakukan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dengan lebih mendalam. Ini mencakup penggunaan sejumlah rasio keuangan yang lebih beragam untuk menggambarkan situasi keuangan daerah yang sebenarnya. Selain itu, peningkatan durasi waktu penelitian juga diharapkan, sehingga hasil penelitian menjadi lebih handal dan akurat daripada yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

2. Bagi BPKAD Kabupaten Minahasa
 - a. Pertumbuhan belanja selama periode tersebut memberikan gambaran bahwa angka presentase yang dihitung bisa menjadi acuan yang berguna dalam meningkatkan penyusunan anggaran untuk periode tahun anggaran selanjutnya.
 - b. BPKAD Kabupaten Minahasa perlu terus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan anggaran belanja daerah, terutama dalam konteks APBD secara keseluruhan. Dengan peningkatan kinerja yang signifikan, efektivitas, produktivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan belanja dapat tercapai dengan lebih baik. Hal ini sangat penting dalam mencapai optimalisasi yang sesuai dengan visi dan misi BPKAD Kabupaten Minahasa. Melalui upaya-upaya ini, efisiensi dalam pengelolaan anggaran BPKAD Kabupaten Minahasa akan semakin solid, dan pertumbuhan anggaran belanja yang rasional dapat diperoleh dari tahun ke tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajriyah, M. (2019). *Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2018*.
- Halim, A. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah (ed. 3) Koran*. Penerbit Salemba.
- Katit, F. X. ., & Pitani, S. (2016). Analisis kinerja belanja pada pemerintah daerah Kabupaten Asmat Provinsi Papua. *Jurnal Emba*, 4(3), 572–582.
- Liando, G. Y., & Elim, I. (2016). Analisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran (Ira) pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1).
- Manumpil, A., & Sumual, F. M. (2022). Analisis Perencanaan Keuangan APBD Pada Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(2), 157–166. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i2.3027>
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Palilingan, A. F., Sabijono, H., Mawikere, L., Kinerja Belanja..., A., Palilingan, A. F., Sabijono, H., Mawikere, L., Ekonomi, F., Bisnis, D., Akuntansi, J., Sam, U., & Manado, R. (2015). ANALISIS KINERJA BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PADA DINAS PENDAPATAN KOTA MANADO. *Jurnal EMBA*, 17(1), 17–25.
- Ratmono, D. (2017). *Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual*. UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Sartika, D. (2018). *ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI SUMATERA UTARA*.



- Wongkar, D. L., Senduk, V. A., & Tanor, L. A. O. (2021). *PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP MINAHASA*. 2(1), 1–7.
- Fajriyah, M. (2019). *Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2018*.
- Halim, A. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah (ed. 3) Koran*. Penerbit Salemba.
- Katit, F. X. ., & Pitanik, S. (2016). Analisis kinerja belanja pada pemerintah daerah Kabupaten Asmat Provinsi Papua. *Jurnal Emba*, 4(3), 572–582.
- Liando, G. Y., & Elim, I. (2016). Analisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran (Ira) pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1).
- Manumpil, A., & Sumual, F. M. (2022). Analisis Perencanaan Keuangan APBD Pada Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(2), 157–166. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i2.3027>
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Palilingan, A. F., Sabijono, H., Mawikere, L., Kinerja Belanja..., A., Palilingan, A. F., Sabijono, H., Mawikere, L., Ekonomi, F., Bisnis, D., Akuntansi, J., Sam, U., & Manado, R. (2015). ANALISIS KINERJA BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PADA DINAS PENDAPATAN KOTA MANADO. *Jurnal EMBA*, 17(1), 17–25.
- Ratmono, D. (2017). *Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual*. UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Sartika, D. (2018). *ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI SUMATERA UTARA*.
- Wongkar, D. L., Senduk, V. A., & Tanor, L. A. O. (2021). *PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP MINAHASA*. 2(1), 1–7.